

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sudah melakukan reformasi keuangan negara yang dimulai pada tahun 2003 telah memberikan mandat yang lebih besar kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Hal tersebut menjadi pendorong bagi BPK untuk berkontribusi dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD tahun 1945.

Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.¹

Kondisi keuangan dan hasil operasi dalam sektor publik yang tercermin dalam laporan keuangan daerah pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Informasi tentang

¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>, pada tanggal 04 Mei 2020 Pukul 13.01.

kondisi keuangan dan hasil operasi dari suatu pemerintahan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.²

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) dan pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).³

Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karena sering terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK pada saat melaksanakan audit Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan yakni, Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan dapat dipahami.⁴

Pemberian opini mengenai hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dari hasil audit tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut. Akan tetapi meskipun berhasil mempertahankan opini tersebut, BPK masih menemukan adanya

²Jumigan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 3.

³ As Syifa Nurillah, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Vol.14, No. 2, (Agustus 2014), hlm. 7.

⁴Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah", *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16, No. 2, (Agustus 2016), hlm. 1292.

kelemahan sistem pengendalian, dan adanya rekomendasi yang tahun sebelumnya masih saja terjadi pada tahun berikutnya.⁵

Laporan keuangan pemerintah daerah yang mungkin harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat(4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.⁶

Selain Sistem Pengendalian Intern hal yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu Peran Internal Audit. Dengan adanya auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas, handal serta proses akuntansi dan pelaporan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan.⁷

Hal ketiga yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah adanya sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan pemerintah

⁵Didiet Bachtiar, "*Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kembali Meraih Opini WTP*", diakses dari <http://www.keuanganpamekasankab.com>, pada tanggal 27 September 2019 pukul 09.28.

⁶Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>, pada tanggal 04 Mei 2020 Pukul 13.01.

⁷Dian Irma Diani, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)", Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang, 2014), hlm. 3-4.

merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya, untuk menghasilkan informasi yang berkualitas baik, sebuah organisasi harus mempunyai Sistem Informasi yang baik, sistem Informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik seperti di Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2010, aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (disingkat SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.⁸

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawatitentang Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara dari hasil penelitian Reni Yendrawati menyatakan bahwa sistem pengendalian intertidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas informasi

⁸Rukmi Juwita, "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Trikonomika*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2013), hlm. 205.

laporan keuangan.⁹ Sedangkan penelitian dari Tuti Herawati menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Akan tetapi Secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dan juga terdapat pengaruh tidak signifikan antara kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁰

Penelitian Safrida Yuliani, Nadirsyahdan Usman Bakar tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sementara dari penelitian Ika Sukriah, Akram dan Biana Adha Inapty menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Yaitu auditor yang memiliki pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Akan tetapi secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi terhadap kualitas hasil

⁹ Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah", *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16, No. 2, (Agustus 2016), hlm. 12.

¹⁰ Tuti Herawati, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)", *Jurnal Star & Accounting Research*, Vol. XI, No. 2, (Februari 2014), hlm. 13.

pemeriksaan. Dan juga terdapat pengaruh tidak signifikan antara integritas dan independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.¹¹

Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dari penelitian Rukmi Juwita.¹² Sedangkan pada penelitian Dian Irma Diani, menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman.¹³

Penelitian ini mengacu pada peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi informasi laporan keuangan bahwa terdapat tingkat signifikan dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan penelitian tersebut dan adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern, peran internal audit dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis bagaimana **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Peran Internal Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.”**

¹¹ Safrida Yuliani, dkk., “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2010), hlm. 215.

¹² Rukmi Juwita, “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Trikonomika*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2013), hlm. 20.

¹³ Dian Irma Diani, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”, Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang, 2014), hlm. 3-4

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah guna membahas sebagai batasan penelitian, antara lain:

1. Apakah ada pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Intern, Peran Internal Audit dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di Badam Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah ada pengaruh secara simultan Sistem Pengendalian Intern, Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Intern, Peran Internal Audit dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di Badam Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh secara simultan Sistem Pengendalian Intern, Peran Internal Audit dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, baik bagi objek penelitian, bagi seluruh komponen yang terlibat

didalamnya dan juga bagi peneliti sendiri. Manfaat yang bisa diambil dari penulisan proposal ini yaitu:

1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai kegunaan dari Sistem Pengendalian Intern, Peran Internal Audit dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta dapat menambah pengalaman peneliti mengenai hal baru yang belum pernah diketahui terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni.

2. Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Melalui hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, peran internal audit dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Badan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi/pemerintahan dalam tercapainya tujuan instansi salah satunya yaitu mengenai kualitas laporan keuangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup materi

Penelitian ini berfokus pada dua variabel yaitu variabel independen (X) yang terdiri dari pengaruh sistem pengendalian intern (X1), peran internal audit (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) serta variabel dependen (Y) yaitu kualitas laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.

a. Sistem Pengendalian Intern (*internal control system*) (X1)

Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart yaitu:¹⁴

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Aktivitas pengendalian
- 3) Penilaian resiko
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan

b. Peran Internal Audit (X2)

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sukrisno Agoes yaitu:¹⁵

- 1) Pengalaman kerja
- 2) Independensi
- 3) Objektivitas
- 4) Integritas

¹⁴Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 231.

¹⁵Sukrisno Agoes, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 43.

c. Sistem Informasi Akuntansi (X3)

Indikator yang digunakan menurut akmal dalam penelitian ini yaitu:¹⁶

- 1) Efisien
- 2) Efektif
- 3) Ekonomis
- 4) Transparan
- 5) Akuntabel.

d. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Indikator yang digunakan menurut Rahman Pura yaitu:¹⁷

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dipahami
- 4) Dapat dibandingkan

2. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi adalah tempat sesuatu berada. Maka dalam hal ini penulis akan melaksanakan suatu penelitian yang lokasinya berada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan (BKD).

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan suatu anggapan dasar menurut peneliti diyakini atau dianggap benar. Sejumlah asumsi-asumsi atau anggapan dasar yang

¹⁶Akmal, *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hlm. 20.

¹⁷Rahman Pura, *Pengantar Akuntansi I, Pendekatan Siklus Akuntansi*, (Jogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11.

dibuat peneliti dapat berbeda antara satu dengan yang lain, karena apa yang dianggap benar oleh peneliti yang satu dapat dianggap tidak benar atau diragukan kebenarannya oleh peneliti yang lain.¹⁸ Asumsi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Sistem pengendalian intern, peran internal audit, Sistem informasi akuntansi, Kompetensi sumber daya manusia, Sistem akuntansi keuangan daerah, Pemanfaatan teknologi informasi, Pemahaman akuntansi.
2. Penelitian ini menggunakan variabel sistem pengendalian intern, peran internal audit dan sistem informasi akuntansi. Sedangkan variabel lainnya seperti Kompetensi sumber daya manusia, Sistem akuntansi keuangan daerah, Pemanfaatan teknologi informasi, Pemahaman akuntansi nilainya dianggap konstan atau *ceteris paribus*.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan pengujian secara empiris.¹⁹

1. H₀ : Tidak ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁ : Ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

2. H₀ : Tidak ada pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁ : Ada pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan

¹⁸Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2012), hlm. 93-94.

¹⁹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 89.

keuangan.

3. H0 : Tidak ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas

Laporan keuangan

H1 : Ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

H. Definisi Istilah

1. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan sistem prosedur yang diimplementasikan oleh manajemen serta dirancang untuk menjaga aset, dan memastikan catatan akuntansi yang akurat dan handal.²⁰

2. Peran Internal Audit

Peran internal audit merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan penilaian atas laporan keuangan yang dilakukan secara objektif dan independen.²¹

3. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data keuangan menjadi sebuah informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan.²²

²⁰Sanyoto Gondodiyoto, *Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 247.

²¹Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, *AUDITING: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 223.

²²Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, *Sistem informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 57.

4. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan karakteristik kualitatif yaitu, andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.²³

5. Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Jadi berdasarkan definisi istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Sistem pengendalian intern, Peran intern audit dan Sistem informasi Akuntansi Terhadap Kualitas laporan keuangan di Badan Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu untuk menjaga aset, memberikan penilaian terhadap laporan keuangan serta memproses data keuangan untuk menjadi sebuah informasi untuk dapat menciptakan laporan keuangan yang relevan, andal dapat dipahami dan dapat diperbandingkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

²³Rahman Pura, *Pengantar Akuntansi I, Pendekatan Siklus Akuntansi*, (Jogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11.